APBD KOTA YOGYA 2021 PERTIMBANGKAN PENANGANAN COVID-19

Kegiatan Masuk Program Reguler, Semakin Terarah

YOGYA (KR) - Kegiatan terkait penanganan Covid-19 di Kota Yogya sepanjang tahun 2021 berhasil dimasukkan ke dalam program reguler di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan begitu proses penanganan semakin terarah dengan harapan perkembangan kasus dapat dikendalikan serta ekonomi masyarakat lebih cepat bangkit.

Wakil Walikota Yogya sekaligus Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan struktur anggaran dalam APBD 2021 sudah mempertimbangkan tentang penanganan Covid-19. "Kalau di anggaran tahun 2020 kemarin kita banyak melakukan realokasi anggaran dan refokusing kegiatan. Sehingga pos anggaran pada Belanja Tidak Terduga (BTT) cukup besar karena memang kita mencoba untuk melihat kondisi yang terjadi pada masa pandemi tahun kemarin," urainya, Rabu (3/2).

Kendati demikian, pos BTT pada APBD 2021 tetap dialokasikan hanya besarannya tidak sebanyak tahun lalu. Tahun ini BTT dialokasikan Rp 13,126 miliar sedangkan tahun lalu mencapai ratusan miliar rupiah. Tingginya BTT pada tahun lalu karena kegiatan untuk menghadapi pandemi belum direncanakan sebelumnya. Sehingga pemerintah harus bergerak cepat dalam merespons kondisi tanggap darurat tersebut.

Heroe menjabarkan, gambaran umum struktur APBD selalu berpijak pada dua hal yakni mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah serta pembangunan tematik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penanganan Covid-19 yang masuk dalam program reguler di tiap OPD menjadi bagian untuk mengatasi persoalan di wilayah. "Kalau kemarin itu kan kondisinya seperti itu maka sebagian besar program Covid-19 ada di BTT. Tapi sekarang kita sudah mengalami dan merasakan adanya pandemi ini maka program dan kegiatan di OPD otomatis merespons untuk mengatasi permasalahan," jabarnya.

Dicontohkannya kegiatan pengawasan penegakan protokol kesehatan dalam mendukung kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Operasional pengawasan dari pagi, siang hingga malam hari terutama di wilayah sudah dialokasikan melalui kemantren. Pada tahun lalu, kegiatan tersebut masuk dalam pos anggaran BTT. Begitu pula penanganan masalah kesehatan. Sebagian besar kegiatan di Dinas Kesehatan sudah dialokasikan untuk penanganan secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya program reguler Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) salah satu fokusnya ialah untuk pencegahan.

Sedangkan pos anggaran BTT akan lebih fokus untuk penanganan yang sifatnya darurat dan mendesak. Dukungan untuk penanganan medis serta pemulihan ekonomi pun jika diperlukan bisa ditambah melalui BTT. "Penanganan pandemi ini masih jadi prioritas dan sekarang semakin terarah. Dalam perjalanannya nanti juga masih ada peluang perubahan anggaran yang dibahas bersama dewan," tandasnya.

Heroe optimis kasus yang terjadi di Kota Yogya bisa semakin cepat dikendalikan. Melihat perkembangan kasus harian yang terjadi sepanjang Januari hingga Februari, justru trennya menurun. Dalam beberapa hari memang sempat terjadi tambahan hingga 100 kasus. Akan tetapi hal itu karena persoalan teknis di tingkat laboratorium akibat kerusakan alat sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi hasil dari observasi beberapa hari sebelumnya.

Di samping itu, seiring masuknya tahap vaksinasi maka harapannya akan mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas. Pada saatnya pun seluruh elemen masyarakat akan mendapat jatah vaksinasi secara gratis dari pemerintah. "Sudah diawali dari tenaga medis dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketika semua berhasil divaksin, bukan berarti protokol kesehatan lantas diabaikan karena itu sudah menjadi kebiasaan kita dalam menghadapi peradaban baru," urainya. **(Dhi)-f**

KR-Ardhi Wahdan

Heroe Poerwadi (tengah) bersama jajaran Forkompimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama usai menuntaskan vaksinasi Covid-19.

PWK UGM Donasikan Rp 12 Juta Melalui KR Peduli

KR-Franz Boedi Soekarnanto

Ny Bambang Sumiarto (dua dari kanan) menyerahkan donasi secara simbolis kepada Prof Dr Inajati Andrisijanti (dua dari kiri) didampingi Fajar Kusumawardhani SE.

YOGYA (KR) - Persatuan Wanita Keluarga Universitas Gadjah Mada (PWK UGM) menyerahkan donasi sebesar Rp 12 juta melalui 'KR Peduli', sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan dalam rangka puncak HUT ke-70 PWK UGM.

"Kami memilih menyerahkan donasi melalui 'KR Peduli' agar lebih tepat sasaran. PWK UGM selama ini juga aktif dalam kegiatan sosial seperti memberikan bantuan air bersih di Gunungkidul. Namun, akibat Covid-19 dan semakin berkurangnya permintaan air bersih, kami berinisiatif menghimpun dana dan diserahkan melalui program 'KR Peduli'," ungkap Ketua PWK UGM Ny Bambang Sumiarto, didampingi mantan Ketua PWK UGM Ny Loekman Sutrisno dan pengurus lain. Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Komisaris Utama *PT BP KR* Prof Dr Inajati Andrisijanti bersama Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE, Rabu (3/2).

Menurut Ny Bambang Sumiarto, PWK UGM setiap bulan juga mengadakan pertemuan rutin di Wisma Kagama dan mengajak para anggota berwirausaha meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan, pendanaan dan operasional berasal dari seluruh anggotanya. Namun, akibat pandemi Covid-19 pertemuan rutin diubah dua bulan sekali melalui daring (virtual). Selain itu, PWK UGM juga mengirim wakil sebagai peserta pertemuan Kowani di Jakarta.

"Alhamdulillah sampai saat ini PWK masih eksis. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membesarkan organisasi wanita pertama di lingkungan UGM ini sepert Prof Sardjito, Ibu Sardjito dan Prof Koesnadi Hardjosoemanti SH," tandasnya.

Sementara itu Prof Dr Inajati Andrisijanti menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan PWK UGM menyalurkan donasi melalui 'KR Peduli'. Sesuai dengan slogan 'Migunani Tumraping Liyan', dimana *KR* selalu aktif menyalurkan donasi para pembaca setia mulai dari gempa Bantul, Gema Sumbar, Gempa Poso dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. **(Tom)**-f

UNTUK PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Dewan Dukung Pemberian Keringanan Retribusi

YOGYA (KR) - Rencana Dinas Perdagangan untuk menyiapkan bentuk relaksasi bagi pedagang pasar tradisional di Kota Yogya mendapat dukungan dewan. Bahkan keringanan retribusi seperti halnya pada tahun 2020 lalu didesak segera diberlakukan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 serta perpanjangan status tanggap darurat di DIY dan adanya pemberlakuan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) cukup berdampak pada kunjungan pasar. "Kondisi ini menyebabkan omzet pedagang tradisional pasti merosot. Kami mendorong agar keringanan retribusi bagi pedagang pasar tradisional bisa segera digulirkan kembali," jelasnya, Rabu (3/2).

Upaya itu dinilainya sangat tepat terutama bagi para pedagang pasar. Menurutnya, kebijakan pemberian keringanan retribusi guna mendukung pemulihan ekonomi. Dasar kebijakan itu pun bisa menginduk pada kondisi tanggap darurat yang kembali diperpanjang.

Selain itu, anggota Fraksi PKS tersebut juga mendorong Pemkot Yogya untuk segera melaksanakan kembali program belanja di pasar secara online dari rumah. Progam ini dinilai mampu mendorong meningkatnya transaksi perdagangan di pasar. "Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tak perlu ke luar rumah untuk belanja di pasar," katanya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Yunianto Dwi Sutono, sebelumnya mengaku tengah mengkaji bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada pedagang pasar tradisional. Dari penelusuran awalnya, pasar yang cukup terdampak pada masa PTKM ialah Pasar Beringharjo Barat dan Pasar Pakuncen. Sedangkan pasar lain terutama yang memiliki komoditas bahan pokok cenderung sudah cukup stabil.

Terkait program belanja di pasar secara online dari rumah, sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga yakni Gojek. Melalui menu Goshop pada aplikasi Gojek, warga Kota Yogya yang berbelanja di pasar tradisional mendapatkan pengembalian ongkos kirim sebesar Rp 10.000. **(Dhi)-f**

OMSET TURUN DRASTIS SELAMA PTKM

PKL Minta Kelonggaran Waktu Usaha

YOGYA (KR) - Para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) DIY mengeluhkan penurunan omset yang sangat drastis selama penerapan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) untuk menekan penularan Covid-19. Apkli DIY mengusulkan PTKM tidak diperpanjang lagi. Tapi kalaupun terpaksa diperpanjang, Apkli DIY meminta kelonggaran waktu membuka usaha.

"Kalau PTKM harus diperpanjang lagi, kami meminta kebijakan khusus kepada Pemda DIY terkait waktu membuka usaha bagi teman-teman PKL, penutupan jangan hanya sampai jam 7 atau 8 malam, kalau bisa sampai jam 11 malam," terang Ketua Umum DPW Apkli DIY Mohlas Madani kepada wartawan usai dirinya dan ketua Apkli kabupaten/kota se-DIY beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud di ruang serbaguna, Gedung Sekretariat DPD RI, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Rabu (3/2).

KR-Devid Permana

Cholid Mahmud (kanan) didampingi Mohlas Madani.

Menurut Mohlas, selama pandemi Covid-19, para pedagang kaki lima sudah mengalami penurunan omset sampai 50 persen. Penurunan itu diperparah lagi dengan pemberlakuan PTKM, karena mereka terpaksa menutup warungnya pukul 20.00 WIB, padahal mereka baru buka warung pukul 17.00 WIB. "Omsetnya jadi terjun bebas. Tak sedikit juga yang memilih tutup karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan," ujarnya.

Cholid Mahmud memahami keresahan yang dirasakan para PKL di DIY, dan akan segera mengkomunikasikannya dengan Pemda DIY.

Menurut Cholid, semua pihak sangat memahami tujuan PTKM untuk menekan penularan Covid-19. Tapi kebijakan dalam PTKM perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat terutama PKL. Sehingga apabila PTKM harus diperpanjang, perlu ada poin yang memberikan kelonggaran waktu membuka usaha bagi PKL, tentu saja harus diimbangi dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Para PKL sudah berjanji siap untuk disiplin menerapkan prokes dalam usahanya, dan saya rasa persoalan bukan pada waktu/jamnya, tapi pada disiplin menerapkan prokes. Selama mereka disiplin menerapkan prokes, pelonggaran waktu berusaha bagi PKL sampai jam 11 malam, tidak masalah," pungkasnya. **(Dev)-f**

LOKET PEMBAYARAN SEMAKIN LUAS

Tagihan PBB Dapat Dicek Melalui JSS

YOGYA (KR) - Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya kini bisa dicek melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dapat mengetahui tagihannya lebih awal.

"Sudah bisa dicek melalui JSS. Cukup memasukkan nomor objek pajak (NOP)," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, Rabu (3/2).

Selain aplikasi JSS, wajib pajak juga dapat membuka laman jss.jogjakota.go.id. Kemudian memasukkan username serta password untuk login, dan memilih menu layanan umum informasi PBB. Selanjutnya tinggal memasukkan nomor objek pajak dan klik periksa. Jika nomor objek pajak yang dimasukkan sudah benar, maka akan tampil informasi mengenai tagihan PBB yang belum dibayarkan.

Wasesa berharap, layanan pengecekan tagihan PBB melalui aplikasi Jogja Smart Service tersebut akan memudahkan wajib pajak mengetahui nilai tagihan meskipun SPPT PBB belum diterima. "SPPT PBB sudah kami sampaikan ke tiap kelurahan. Harapannya maksimal Maret mendatang semua wajib pajak sudah bisa menerimanya," imbuhnya.

Sedangkan untuk loket pembayaran PBB di Kota Yogya juga semakin luas. Antara lain melalui berbagai cara seperti loket Bank BPD DIY, BNI, BRI, Bank Jogja maupun PT Pos Indonesia. Selain itu masih ada kanal lain seperti ATM BPD DIY atau mobile banking BPD DIY serta melalui aplikasi uang elektronik Gopay, Tokopedia, Link Aja, dan di loket layanan pajak daerah.

Wasesa menambahkan, tahun ini di Kota Yogya terdapat 95.782 wajib pajak PBB. Dibanding tahun lalu jumlahnya lebih banyak karena adanya penambahan kepemilikan tanah dan bangunan baru atau pecah waris. Target perolehan PBB pun dinaikkan dari Rp 82,5 miliar pada tahun lalu menjadi Rp 86 miliar. Meski jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September, namun wajib pajak diimbau membayar kewajibannya lebih awal.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak PBB di Kota Yogya yang tetap memenuhi kewajibannya meski dihadapkan pada masa sulit akibat pandemi Covid-19. **(Dhi)-f**

AGAR PTKM TAK DIPERPANJANG

Penegakan Prokes Harus Dilaksanakan

YOGYA (KR) - Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang diharapkan bisa menekan kasus positif, tidak bisa dipungkiri telah menimbulkan persoalan bagi sektor pariwisata. Karena sejak dilakukannya kebijakan PTKM, masyarakat merasa khawatir dan memilih untuk mengurangi aktivitas. Dampaknya pendapatan pengelola hotel, restoran dan industri pariwisata lain mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa di antara terancam gulung tikar.

"Dampak dari kebijakan PTKM selain pada sektor perekonomian juga pariwisata. Karena sejak kebijakan tersebut dilakukan event-event di hotel maupun fasilitas publik secara otomatis berkurang. Begitu pula dengan jam operasional di restoran juga dibatasi. Meski begitu untuk menekan kasus positif kebijakan PTKM harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Pengamat pariwisata sekaligus Direktur Akademi Pariwisata Stipary Suharto SE MPar di Yogyakarta, Rabu (3/2).

Dikatakan, supaya kebijakan PTKM tidak diperpanjang dan penambahan kasus bisa ditekan, penegakkan Prokes harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya jika mereka tidak mau mengabaikan Prokes akan rugi sendiri, karena ada kemungkinan PTKM akan diperpanjang. Apabila hal itu sampai terjadi dan terus menerus diperpanjang, pengusaha hotel dan restauran banyak yang dirugikan. Padahal di DIY banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

"Kalau PTKM berkepanjangan, hotel dan restauran tidak akan bisa beroperasi secara normal. Kondisi itu bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja sehingga sektor ekonomi akan terganggu. Supaya hal itu tidak terjadi kami berharap masyarakat untuk patuh, tertib dan disiplin terhadap penegakkan Prokes,"terangnya. **(Ria)-f**